

ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT TERHADAP HASIL AUDIT OPERASIONAL (STUDI KASUS PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG PANGKALPINANG)

TOMZIL

Hendarti Tri Setyo Mulyani
Zamhari

Accounting Program
STIE-IBEK Bangka Belitung
Pangkalpinang, Indonesia
e.jurnal@stie-ibek.ac.id

Abstract- *The title of this research in Bahasa Indonesia; “Analisis Prosedur Pemberian Kredit Terhadap Hasil Audit Operasional (Studi Kasus Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang” with a total of 131 pages. The purpose of this study is to know the procedures The granting of credit carried out by PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang has complied with Bank Indonesia Regulation No. 1/6/PBI/1999, and to find out whether the implementation of lending at PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang complies with the applicable credit provisions.*

This study uses a case study approach with a descriptive method that describes how the implementation of operational audits at PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang. The data used are primary data in the form of interviews with the internal auditors of the credit department and other related departments.

Operational audit on credit activities at PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang complies with Bank Indonesia Regulation No. 1/6/PBI/1999 where the operational audit has been carried out with a systematic process that refers to the Standards for the Implementation of the Bank's Internal Audit Function (SPFAIB).

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang is in good condition, because its implementation is maintained in accordance with the credit provisions that it has made.

Keywords: *Operational Audit and Credit Provision.*

I. PENDAHULUAN

Di dalam suatu negara, pastinya terdapat pemerintahan yang mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut pasti terdapat sistem perekonomian yang diterapkan. Baik negara besar ataupun kecil, dengan kepadatan penduduk rendah ataupun tinggi pasti memiliki sistem keuangan atau moneter yang mengatur peredaran uang di dalam negeri.

Pada sistem moneter yang diterapkan suatu negara tentu di dalamnya terdapat unsur atau organisasi yang terpercaya dan diakui secara badan hukum untuk mengelola dan mengatur uang beredar agar tercipta situasi perekonomian yang kondusif. Salah satu organisasi yang umumnya ada di setiap negara dan berperan dalam sistem moneter yaitu bank.

Perbankan di Indonesia dalam melaksanakan usahanya berlandaskan pada asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian. Bank sendiri mempunyai fungsi yaitu sebagai penghimpun dan mengatur dana masyarakat dan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak dan itu sudah tercantum dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang – undang Perbankan Tahun 1992.

Bank adalah salah satu bentuk badan usaha yang memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat serta menyebarkan kembali dalam bentuk pemberian kredit. Salah satunya adalah pemberian kredit kepada perusahaan– perusahaan besar dengan golongan ekonomi kuat dan perusahaan – perusahaan kecil dengan golongan ekonomi yang lemah, ada pun kredit

diberikan kepada setiap masyarakat yang membutuhkan tambahan modal untuk membuka dan menjalankan usaha, walaupun demikian kita harus tahu bahwa bank juga merupakan perusahaan atau badan usaha yang juga mengharapkan suatu keuntungan dan hal itu merupakan suatu yang wajar. Tetapi dalam pemberian kredit, disamping memenuhi tujuan perusahaan tersebut yakni *profit motive* bank juga harus mampu melakukan pembinaan terhadap debiturnya, sehingga kredit yang telah disalurkan tersebut dapat memenuhi sasaran semula. Di samping itu juga dapat mengamankan harta kekayaan yang dapat disalurkan ke bank.

Selain itu, apakah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang juga memperhatikan peluang – peluang pertumbuhan dari perusahaan – perusahaan yang mengajukan pengambilan kredit kepada bank. Karena menurut Myers (1977) dalam Monita Fransiska (2012) menyatakan bahwa “nilai suatu perusahaan dapat dilihat dari peluang pertumbuhan pada perusahaan tersebut. Bank akan cenderung memberikan kredit kepada perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi. Sedangkan menurut Psillaki *et al.*, (2010) dalam Monita Fransiska (2012), menyatakan bahwa “peluang pertumbuhan justru menimbulkan risiko kredit, karena perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi biasanya melakukan investasi pada proyek yang memiliki *Net Present Value* (NPV) yang tinggi. Oleh sebab itu, banyak perusahaan yang mengajukan kredit untuk mendanai proyek tersebut. Kredit yang besar akan menimbulkan risiko yang besar bagi bank, seperti perusahaan yang tidak mampu membayar kembali pinjaman dan bunga pinjaman tersebut.

Adapun pemeriksaan yang terkait dengan prosedur pemberian kredit ini adalah pemeriksaan operasional atau biasa kita kenal dengan istilah audit operasional. Menurut tunggal (2001), audit operasional yaitu proses yang sistematis, menilai operasi organisasi, menilai efektifitas, efisiensi dan ekonomi koperasi, melaporkan kepada orang yang tepat, dan memberikan rekomendasi atau perbaikan.

Audit operasional pada umumnya dipahami sebagai penyelesaian atas masalah efisiensi dan efektifitas, karena pengujian terhadap efektifitas pengendalian intern oleh auditor intern merupakan bagian dari audit operasional jika tujuannya adalah membantu perusahaan menjalankan kegiatan usahanya supaya lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa audit operasional merupakan alat bantu bagi manajemen khususnya dalam fungsi pengendalian intern.

Dengan adanya pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk Kantor Cabang Pangkalpinang kepada nasabah banyak pertimbangan yang dilakukan oleh bank tersebut supaya menekan angka resiko piutang macet atau

bahkan piutang tak tertagih, dan pembayaran yang diterima perusahaan dapat berjalan dengan lancar serta orang yang bertindak sebagai pelaksanaan pemberian kredit dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, diperlukan suatu pemeriksaan. Dalam kaitannya dengan pemeriksaan, perlu terlebih dahulu memahami prosedur pemberian kredit serta prinsip-prinsip kredit yang dimiliki oleh perusahaan. Pemeriksaan ini ditujukan untuk mengantisipasi setiap kecurangan, penyelewengan, dan penyimpangan yang terjadi yang dapat merugikan perusahaan dan dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan manajemen. Dalam melaksanakan pemberian kredit terhadap calon konsumen, diperlukan pemeriksaan terhadap setiap prosedur yang dilakukan oleh pelaksana agar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan serta memenuhi prinsip-prinsip dalam pemberian kredit.

Secara umum tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan audit operasional terhadap prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang Telah memadai.
2. Mengetahui system pelaksanaan audit operasional PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang sudah sesuai dengan SOP audit operasional.
3. Agar masyarakat lebih mengetahui adanya pemberian kredit yang diberikan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang.

II. LANDASAN TEORI

Akuntansi

Akuntansi ialah sebuah proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengelola dan menyajikan data transaksi dalam kegiatan yang berhubungan dengan keuangan yang sehingga bisa digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti dalam pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

Kata akuntansi berasal dari kata asing yaitu *Accounting* yang artinya jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu menghitung atau mempertanggung jawabkan. Akuntansi ini digunakan hampir semua kegiatan bisnis di seluruh dunia dalam mengambil keputusan sehingga bisa disebut sebagai bahasa bisnis.

Manfaat Akuntansi

Manfaat akuntansi yaitu :

1. Membantu dalam mengalokasikan sumberdaya yang langka (modal) untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang besar / optimal.
2. Sebagai landasan para manejer dalam mengendalikan biaya, mendapatkan harga dan menginvestasikan sumber daya perusahaan ke bidang yang di anggap paling tepat.
3. Dengan pelaporan akuntansi perusahaan dapat menganalisis data dan menilai bagaimana manager atau pegawai menggunakan sumber daya tertentu dalam perusahaan.

Pengertian Bank

Bank berasal dari bahasa Italia, yaitu *bance* yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*.

Pada dasarnya Bank dapat diartikan sebagai lembaga yang memediasi antara pihak surplus dana dengan pihak defisit dana. Pihak surplus dana adalah masyarakat yang memiliki uang lebih yang dapat disimpan di bank dalam bentuk : giro, deposito dan tabungan. Sedangkan pihak defisit dana adalah masyarakat yang mengalami kekurangan dana yang dapat dipenuhi dengan cara meminjam di Bank dalam bentuk kredit (*Loan*), (Dr. Dedy Takdir Syaifuddin, 2007).

Fungsi Bank

Koch dan Donald (2001), menyatakan bahwa :

Bank berfungsi sebagai lembaga *intermediasi*. *Intermediasi* keuangan adalah proses pembelian *surplus* dana dari unit ekonomi yaitu, sektor usaha, pemerintah dan individu atau rumah tangga, untuk disalurkan kepada unit ekonomi *defisit*. Dengan kata lain, intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari penabung atau kreditur (*ultimate lenders*) kepada peminjam atau debitur (*ultimate borrowers*)”.

Berdasarkan definisi pakar diatas, dapat disimpulkan tiga fungsi bank dalam pembangunan ekonomi, yaitu :

1. Bank sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan.
2. Bank sebagai lembaga penyalur dana ke masyarakat dalam bentuk kredit.
3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang.

Fungsi umum bank adalah *intermediary* antara *surplus* dana (nasabah penabung : Kreditur) dengan *defisit* dana (nasabah peminjam : *Debitur*). Fungsi khusus bank menurut para pakar :

Menurut Howard D. Crosse dan George H. Hempel (1997) dalam buku Dr. Dedy Takdir Syaifuddin (2007), menyebutkan 7 fungsi pokok bank umum :

1. *Credit creation* (penciptaan kredit)
2. *Depository function* (fungsi giral)
3. *Payments and collection* (pembayaran dan penagihan)
4. *Saving accumulations and investment*
5. *Trust service*
6. *Other service*
7. Perolehan laba untuk imbalan para pemegang saham.

Pengertian Audit

Audit atau pemeriksaan dalam arti evaluasi bermakna luas dari suatu organisasi, sistem, proses atau produk. Audit dilakukan oleh yang kompeten, objektif dan tidak memihak yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa subjek audit telah selesai atau berjalan sesuai dengan standar, peraturan dan praktik yang telah disetujui dan diterima.

Pengertian audit menurut ahli adalah sebagai berikut: Menurut Sukrisno Agoes (2004), audit adalah “pemeriksaan yang dilakukan untuk secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan catatan akuntansi dan bukti pendukung dalam rangka memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan”.

Menurut Arens dan Loebbecke (2003), menyatakan bahwa “*auditing* adalah sebagai proses pengumpulan dan evaluasi bukti informasi yang dapat diukur pada suatu entitas ekonomi yang membuat kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan informasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh team yang independen dan kompeten.

Pengertian Audit Operasional

Audit operasional sering disebut sebagai audit manajemen atau audit kinerja (operasional), adapun pengertian dari audit manajemen tersebut adalah pemeriksaan dan investigasi dari suatu organisasi dalam bentuk aspek manajemen dari yang paling tinggi sampai dengan yang paling bawah dan pembuatan laporan audit mengenai efektifitasnya atau dari segi probabilitasnya dan efisiensi kegiatan bisnisnya. Sedangkan pengertian dari audit operasional adalah uraian aktifitas perusahaan yang sistematis dalam hubungannya dengan tujuan untuk melihat, mengidentifikasi peluang perbaikan atau mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan.

Menurut Guy dkk (2003) dalam Nurul Wulandari (2011), menerangkan bahwa audit operasional merupakan penelaahan atas prosedur dan metode operasi entitas untuk menentukan tingkat efisiensi dan efektifitasnya. Pada kesimpulan tentang audit

operasional, rekomendasi yang umumnya diberikan adalah memperbaiki prosedur. Audit operasional kadang – kadang disebut audit kinerja, audit manajemen atau audit komprehensif.

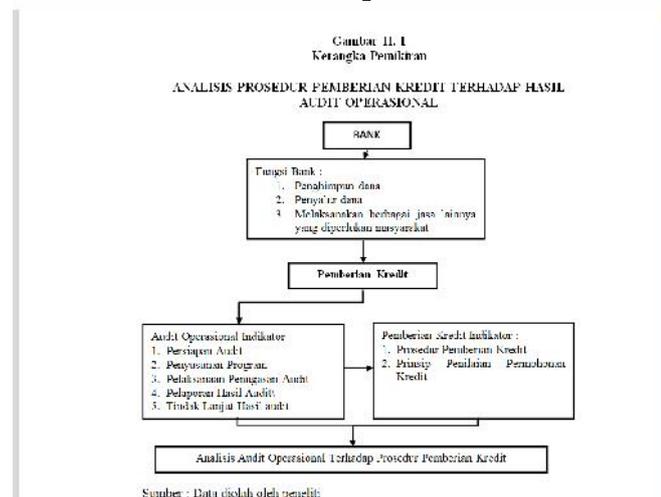
Kerangka Berpikir

Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peran yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi suatu Negara, hal ini bisa dilihat melalui definisi perbankan sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 2 tentang perbankan, dimana fungsi bank dapat dijabarkan dalam 3 hal, yaitu sebagai berikut :

1. Bank sebagai perhimpunan dana, yaitu bank menyimpan dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan.
2. Bank sebagai penyalur dana, yaitu bank menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pinjaman kepada masyarakat.
3. Bank melaksanakan berbagai jasa yang diperluka masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyusun kerangka pemikiran yang digunakan untuk mengetahui alur dari penelitian ini dan digunakan untuk menyelesaikan penelitian, dapat dilihat Gambar 1 di bawah ini:

Gambar 1.
Kerangka Pemikiran
Analisis Prosedur Pemberian Kredit Terhadap
Hasil Audit Operasional



Sumber : Data diolah oleh peneliti (2021)

III. METODOLOGI PENELITIAN

Teknik Analisa Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Eko Sugiarto (2015) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang

temuan – temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik konstektual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:72) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi mupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.. Dengan berisikan berbagai pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh responden dengan sadar dan tanpa adanya paksaan. Daftar pertanyaan tersebut bersifat tertutup.

Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung mengenai keadaan perusahaan dan prosedur pemberian kredit, khususnya kepada pimpinan dan karyawan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pangkalpinang yang dilakukan secara formal.

Teknik wawancara yaitu *direct interview* (wawancara langsung). Adapun format dari pertanyaan wawancara ini terdiri dari 9 (Sembilan) bagian yaitu :

1. Untuk tahap permohonan 6 pertanyaan
2. Untuk tahap analisis kelayakan kredit 4 pertanyaan
3. Untuk tahap pemeringatan kredit 3 pertanyaan
4. Untuk tahap keputusan kredit 4 pertanyaan
5. Untuk tahap perjanjian kredit 4 pertanyaan
6. Untuk tahap realisasi kredit 3 pertanyaan
7. Untuk tahap pembukuan kredit 2 pertanyaan
8. Untuk tahap dokumentasi kredit 3 pertanyaan
9. Untuk tahap supervise dan pelaporan 5 pertanyaan

IV. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Audit Operasional terhadap Prosedur Pemberian Kredit yang Dijalankan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang.

Auditor internal sebagai pelaksana audit operasional pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang membantu pihak manajemen dalam usaha mencapai efektivitas kegiatan operasional, selain itu kegiatan ini dilakukan untuk mendeteksi sedini mungkin berbagai kemungkinan penyimpangan atau kelemahan yang mungkin ditemukan. Kegiatan yang dilakukan auditor internal pada tahap persiapan audit adalah pendekatan auditor

intern, penetapan penugasan dengan dikeluarkannya surat penugasan yang menetapkan ketua, anggota tim audit, waktu yang diperlukan serta tujuan audit, kemudian dilakukan pemberitahuan audit dan penelitian pendahuluan.

Persiapan Audit

Pendekatan Auditor Intern

Pada pelaksanaannya tahapan pendekatan auditor internal sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 ditahapan persiapan audit yaitu memperhatikan aspek-aspek teknis seperti cara dan penetapan sampling, teknik pengujian yang dilakukan, minimal bukti audit yang diperlukan dan cara mendapatkannya.

Penetapan Penugasan

Penetapan penugasan disampaikan oleh kepala Divisi Pengawasan kepada ketua dan tim audit dalam bentuk surat penugasan, yang antara lain menetapkan ketua dan anggota tim audit, waktu yang diperlukan serta tujuan audit. Jumlah tim audit yang ditugaskan dalam pemeriksaan kredit adalah tiga orang auditor yang terdiri dari ketua tim, satu orang auditor untuk pemeriksaan kredit komersil dan satu orang auditor untuk pemeriksaan kredit personal. Waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan audit adalah selama 4 hari, pelaksanaan pada tahap ini sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 di tahapan persiapan audit.

Pemberitahuan Audit

Pelaksanaan pemeriksaan kredit dilengkapi dengan surat pemberitahuan audit yang disampaikan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang sebelum audit dilaksanakan. Dalam surat pemberitahuan tersebut antara lain mengemukakan:

- 1) Penegasan kembali wewenang auditor internal kredit untuk melakukan audit kredit sebagaimana telah ditetapkan pada *Internal Audit Charter*.
- 2) Rencana pertemuan awal dengan kepala satuan kerja *Auditee*, yang dimaksudkan untuk menjelaskan tujuan audit serta sekaligus mendapatkan penjelasan dari kepala satuan kerja *Auditee* mengenai kegiatan dan fungsi dari satuan kerja *Auditee*.
- 3) Susunan ketua dan anggota tim.
- 4) Informasi yang diperlukan.

Selanjutnya kepala satuan kerja *auditee* dalam hal ini PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang meneruskan kepada pejabat bawahannya sebagai pemberitahuan akan dilakukan audit oleh Auditor Internal kredit dan instruksi untuk mempersiapkan data/informasi serta dokumen yang diperlukan. Pada pelaksanaannya, tahapan ini sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 pada tahap persiapan audit.

Penyusunan Program Audit

Auditor internal kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang membuat rencana kerja yang harus dilakukan selama pemeriksaan kredit yang didasarkan atas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta informasi yang ada tentang kegiatan perkreditan yang diperiksa.

Pelaksanaan Penugasan Audit

Melakukan pemeriksaan pengendalian

Pada tahap ini pemeriksaan pengendalian PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang meliputi hal berikut:

1. Evaluasi Pengendalian

Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim SKAI atas prosedur pelaksanaan kredit, menyatakan bahwa praktik yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang ditetapkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang.

2. Uji Pengendalian

Tim SKAI PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang melakukan pengujian langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkreditan untuk menilai apakah pihak-pihak yang terkait dalam organisasi dan manajemen kredit apakah telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan peran masing-masing.

3. Uji Terinci

Tim SKAI PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang melakukan pengujian terinci dengan menganalisis fungsi/peran setiap bagian yang terkait dengan kegiatan perkreditan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang. Seperti pimpinan, divisi administrasi kredit, divisi legalisasi dan realisasi, divisi penagihan dan supervisi, divisi pelaporan, divisi manajemen resiko dan divisi analisis kredit.

Pengumpulan Bukti Audit

Bukti audit akan disampaikan pada tahap pelaporan hasil audit.

Evaluasi Hasil Audit

Evaluasi hasil audit dilakukan setelah tahap pelaporan hasil audit maksimal satu bulan setelah hasil audit dikeluarkan. Pada pelaksanaannya, tahapan ini sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 pada tahap pelaksanaan penugasan audit.

Hasil analisis pelaksanaan audit operasional terhadap prosedur pemberian kredit yang dijalankan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.
Hasil Analisis Pelaksanaan Audit Operasional terhadap Prosedur Pemberian Kredit yang Dijalankan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999

NO	PERATURAN BANK INDONESIA NO. 1/6/PBI/1999	PRAKTIK YANG DILAKUKAN PT. BANK TABUNGAN NEGARA	SESUAI/ TIDAK SESUAI	KE T
1	Persiapan audit a. pendekatan auditor intern	a. Pendekatan Auditor Intern Audit intern memperhatikan aspek-aspek teknis seperti cara dan penetapan sampling, teknik pengujian yang dilakukan, minimal bukti audit yang diperlukan dan cara mendapatkannya	SESUAI	
	b. penetapan penugasan	b. Penetapan penugasan Dikeluarkannya surat penugasan yang menetapkan ketua, anggota tim audit, waktu yang diperlukan, serta tujuan audit oleh Kepala Divisi Pengawasan.	SESUAI	
	c. pemberitahuan audit	c. Pemberitahuan audit Dikeluarkannya surat pemberitahuan audit oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang yang mengemukakan tentang: 1) Penegasan kembali wewenang auditor internal kredit untuk melakukan audit kredit. 2) Rencana pertemuan awal dengan kepala satuan kerja <i>Auditee</i> . 3) Susunan ketua dan anggota tim. 4) Informasi lain yang diperlukan.	SESUAI	
	d. penelitian pendahuluan	d. Penelitian pendahuluan Pada tahap ini auditor internal kredit melakukan pemahaman terhadap <i>auditee</i> , antara lain: Memahami fungsi dan struktur organisasi kredit. Memahami setiap wewenang dan tanggungjawab pihak-	SESUAI	

		pihak yang terkait dengan kegiatan kredit. Seperti yang sudah tersusun pada struktur organisasi kredit diantaranya adalah pimpinan, divisi administrasi kredit, legalisasi dan realisasi, penagihan dan supervisi, pelaporan, divisi manajemen resiko, dan analisis kredit. Memahami kebijakan, sistem dan prosedur kredit.		
2	Penyusunan program audit			
	a. menyatakan tujuan audit 1) Memeriksa struktur organisasi kredit	a. Menyatakan Tujuan Audit 1. Memeriksa struktur organisasi kredit yang dimaksudkan untuk memastikan apakah telah menggambarkan secara spesifik garis kewenangan dan tanggung jawab setiap fungsi dibidang kredit, serta telah menerapkan prinsip pemisahan tugas dan tanggung jawab atas Divisi Administrasi Kredit dan Divisi Manajemen Resiko. 2. Memeriksa penempatan personil kredit apakah sudah sesuai berdasarkan pertimbangan kompetensi (pengetahuan dan keahlian) sesuai dengan posisi jabatan dan tugas yang sudah disebutkan pada struktur organisasi. Penempatan personil didasarkan pada kebutuhan SDM disetiap divisi dan latar belakang pendidikan SDM. Misalnya Divisi Administrasi harus diisi dengan karyawan minimal S1 Akuntansi. 3. Memeriksa apakah pengelolaan kredit telah didukung dengan sistem pengendalian yang cukup serta telah sesuai dengan	SESUAI	
	2) Memeriksa penempatan personil kredit.			
	3) Memeriksa pengelolaan kredit.			

	kebijakan perkreditan bank (KPB), pedoman pelaksanaan kredit (PPK), ketentuan-ketentuan intern lainnya dan ketentuan ketentuan ekstern yang terkait dengan kredit.				
a. Menetapkan pengujian yang diperlukan guna mencapai tujuan audit. Adapun yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan kredit adalah: 1) Organisasi kredit	b. Menetapkan Pengujian yang Diperlukan Mencapai Tujuan Audit Ruang lingkup pemeriksaan kredit adalah: 1. Organisasi kredit Pemimpin cabang, pemimpin bagian administrasi kredit, pemimpin seksi legalisasi dan realisasi, pemimpin seksi penagihan dan supervisi kredit, pemimpin seksi pelaporan, analisis, dan petugas administrasi kredit. 2. Manajemen SDM kredit Terkait dengan penugasan, pendidikan dan pelatihan personil pengelola kredit. 3. Pengendalian kredit Terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan, sistem, dan prosedur kredit dalam pelaksanaan kredit.	SESUAI			
c. menetapkan jangka waktu pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan minimal satu kali dalam setahun.	b. Menetapkan Jangka Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 4 s.d 7 Mei 2021	SESUAI			
c. mengidentifikasi aspek teknis, risiko, proses, dan transaksi yang harus diuji. Menyesuaikan dengan dokumen tahun sebelumnya.	d. Mengidentifikasi aspek teknis, risiko, proses, dan transaksi yang harus diuji Menyesuaikan dengan dokumen audit operasional pada tahun sebelumnya. Apabila diperlukan akan dilakukan tambahan transaksi yang akan diuji untuk melengkapi proses audit.	SESUAI			
3. Pelaksanaan penugasan audit					

a. Proses audit 1) Melakukan pemeriksaan pengendalian.	a. Proses Audit 1) Melakukan pemeriksaan pengendalian yang meliputi: a) Evaluasi pengendalian Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim SKAI atas prosedur pelaksanaan kredit, nantinya akan menyatakan bahwa praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang b) Uji pengendalian Adapun yang nantinya akan diuji adalah organisasi dan manajemen SDM kredit dan implementasi kredit. c) Uji terinci Melakukan pengujian terinci dengan menganalisis fungsi/peran setiap bagian yang terkait dengan kegiatan perkreditan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang. Seperti pimpinan, divisi administrasi kredit, divisi legalitas dan realisasi, divisi penagihan dan supervisi, divisi pelaporan, divisi manajemen resiko dan divisi analisis kredit. 2. Melakukan pemeriksaan pengelolaan kredit yang meliputi: a) Penilaian kecermatan informasi kredit yang berkaitan dengan perhitungan bunga. b) Pemeriksaan kelengkapan transaksi melalui rekonsiliasi yang menyeluruh antara pinjaman yang diberikan untuk setiap jenis dengan pendapatan bunga. c) Pengecekan keberadaan dan	SESUAI
---	--	--------

pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.	Apabila tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang, maka SKAI akan memberikan surat tertulis kepada Direktur PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang untuk segera ditindak lanjuti.	
b. analisis kecukupan tindak lanjut.	b. Analisis Kecukupan Tindak Lanjut Setelah dilakukannya pemantauan hasil tindak lanjut, kemudian dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan Audit. Selanjutnya pengecekan kembali tindak lanjut perlu dilakukan apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.	SESUAI
c. pelaporan tindak lanjut	c. Pelaporan Tindak Lanjut Laporan tindak lanjut ini akan disampaikan langsung oleh Direktur Utama kepada SKAI.	SESUAI

Sumber : diolah oleh peneliti (2021)

Pengujian Hipotesis Pelaksanaan Pemberian Kredit Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang.

1. Tahap Permohonan
2. Tahap Analisis Kelayakan Kredit
3. Tahap Pemingkatan Kredit
4. Tahap Keputusan Kredit
5. Tahap Perjanjian Kredit
6. Tahap Realisasi Kredit
7. Tahap Pembukuan
8. Dokumentasi kredit
9. Supervisi dan Pelaporan

Dalam pengujian ini, peneliti mengamati praktik yang dilakukan kemudian menganalisis kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang. Hasil analisis kesesuaian pelaksanaan pemberian kredit di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang dengan prosedur/ ketentuan dapat dilihat pada table :

Tabel 2.
Hasil Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian Kredit di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang dengan Prosedur/Ketentuan

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Ket.
A	Tahap Permohonan			
1.	Surat pengajuan permohonan kredit dilakukan langsung oleh calon nasabah, tidak melalui pihak ketiga lainnya/broker.	✓		Menemui bagian <i>customer service</i> untuk mendapatkan formulir pengajuan kredit.
2.	Surat permohonan diajukan secara tertulis oleh calon debitur diantaranya mencantumkan secara jelas tujuan surat, tanggal surat, data calon debitur, dan maksud permohonan.	✓		Mengisi Formulir Pengajuan Kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang.
3.	Surat permohonan kredit sebelum dianalisa telah mendapatkan petunjuk/pengarahan terlebih dahulu oleh pimpinan divisi administrasi kredit.	✓		Surat Formulir telah disetujui oleh pimpinan bagian Kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang.
4.	Setiap penerimaan permohonan dicatat pada buku registrasi dan diberikan nomor register, untuk tindak lanjut atas surat permohonan tersebut.	✓		Buku Register PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang.
5.	Bank memeriksa legalitas permohonan kredit. a. sebagai subjek hukum b. izin usahanya c. tidak termasuk daftar hitam bank indonesia daftar kredit macet diindonesia.	✓		Memeriksa riwayat transaksi nasabah di daftar Bank Indonesia secara online.
6.	Legalitas permohonan kredit telah benar a. permohonan diajukan dan mendapat izin dari analisis kredit.	✓		Riwayat nasabah telah benar dan mendapat izin analisis kredit.
B Tahap analisis kelayakan kredit				
1.	Inspeksi dilaksanakan untuk permohonan kredit yang bersangkutan.	✓		Melakukan survei tempat usaha.
2.	Meneliti dan menilai tentang kebutuhan modal, penyediaan dana sendiri oleh debitur, rencana	✓		1. Memperhitungkan besar/kecilnya usaha 2. Melihat slip gaji calon debitur pada

	penarikan kredit, jadwal angsuran, dan penghitungan kelayakan usaha.			bulan terakhir. (Bagi pegawai/PNS) 3. Melihat pembukuan usaha dari calon debitur. (Bagi wiraswasta) 4. Memperhitungkan nilai jaminan yang akan diserahkan oleh debitur kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang.			4. Memperhitungkan nilai jaminan yang akan diserahkan oleh debitur kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang
3.	Analisis harus dilakukan secara sistematis, dan diserahkan kepada divisi legalisasi dan realisasi.	✓		Analisis dilakukan setelah dilakukannya survei usaha dan penilaian terhadap hasil survei.			Batas maksimum plafond yang diberikan nasabah berbeda untuk tiap jenis kredit yang diajukan. Misal untuk kredit renovasi rumah dengan program Rumah Bersinar maksimal jangka waktu kredit hingga 7 tahun.
4.	Hasil analisis merupakan dasar keputusan pemberian kredit oleh divisi legalisasi dan realisasi.	✓		Penetapan keputusan berapa besarnya pinjaman yang diberikan bersifat internal.			Kelengkapan persyaratan kredit dilampirkan bersama surat keputusan pengajuan kredit. Adapun persyaratannya adalah: 1. Mengisi formulir permohonan kredit 2. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP 3. Fotocopy Izin Usaha/Keterangan Usaha 4. Rekening Listrik, Telpon dan PDAM bulan terakhir. 5. Fotocopy jaminan/agunan 6. Bersedia di survey tempat tinggal, usaha, dan letak agunan
C Tahap pemeringatan kredit							
1.	Melakukan pemeringatan kredit dengan berpedoman pada keputusan direksi tentang pedoman pelaksanaan manajemen risiko kredit.	✓		Pemeringatan kredit berdasarkan jumlah kemungkinan resiko kredit yang ditemukan pada saat survei.			Kredit yang ditolak akan disampaikan melalui surat pemberitahuan keputusan pengajuan kredit. Alasan suatu kredit ditolak diantaranya adalah: 1. Kegagalan verifikasi 2. Penipuan atau pemalsuan informasi 3. Dokumen tidak
2.	Melaporkan secara tertulis apabila ditemukan masalah yang nantinya akan menimbulkan resiko kredit.	✓		Melaporkan secara tertulis misal calon debitur sedang melakukan kredit lain. Seperti kredit kendaraan bermotor atau rumah.			
D Tahap keputusan kredit							
1.	Pemutusan pemberian kredit dilakukan atas dasar ketentuan kelayakan kredit yang berlaku	✓		Berdasarkan dari hasil analisis kelayakan kredit, dengan ketentuan: 1. Memperhitungkan besar/kecilnya usaha 2. Melihat slip gaji calon debitur pada bulan terakhir. (Bagi pegawai/PNS) 3. Melihat pembukuan usaha dari calon debitur. (Bagi wiraswasta)			
2.					2.	✓	
3.					3.	✓	
4.					4.	✓	

			terbaca 4. Jumlah kredit terlalu besar
E Tahap perjanjian kredit			
1.	Penandatanganan perjanjian kredit beserta seluruh perjanjian tuntutan, dilaksanakan setelah debitur menandatangani surat persetujuan pemberian kredit (SPPK).	✓	Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) diberikan langsung oleh Administrasi Kredit.
2.	Surat persetujuan pemberian kredit (SPPK) dengan materai diserahkan kembali ke pihak bank.	✓	Apabila sudah dilengkapi dengan materai dan tanda tangan nasabah.
3.	Nominal kredit yang relatif besar atau permasalahan hukum yang cukup kompleks, maka perjanjian kredit dilakukan secara notarial akta.	✓	Diatur dan disiapkan oleh pihak Notaris.
4.	Dokumen perjanjian kredit dibuat minimal rangkap dua, dengan menggunakan satu rangkap untuk bank dan satu rangkap untuk debitur	✓	Digunakan sebagai arsip Bank, dan tanda terima untuk pihak nasabah.
F Tahap realisasi kredit			
1.	Penarikan kredit dapat dilaksanakan setelah debitur menandatangani surat pemberian persetujuan kredit (SPPK) diatas materai.	✓	Tanda tangan langsung dilakukan oleh pihak nasabah yang bersangkutan.
2.	Debitur menandatangani perjanjian kredit berikut tuntutan dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh pihak bank.	✓	Tanda tangan dilakukan setelah pengecekan persyaratan dinyatakan lengkap dan selesai.
3.	Pembebanan biaya yang timbul atas perjanjian kredit seperti biaya provisi, biaya supervisi, premi asuransi biaya administrasi dan biaya lainnya dilaksanakan pada saat realisasi kredit.	✓	Pembebanan biaya akan langsung dikurangkan dari jumlah kredit yang diterima.
G Tahap pembukuan			
1	Pencatatan transaksi atas pelaksanaan pemberian kredit	✓	Merupakan milik pribadi Bank dan bersifat rahasia.

	dilaksanakan sesuai pedoman sandi pembukuan intern bank.		
2.	Segala transaksi harus dibukukan yaitu transaksi realisasi kredit, penerimaan provisi, biaya supervisi, penerimaan biaya administrasi kredit, penerimaan bunga, penerimaan denda, penerimaan angsuran pokok.	✓	Pencatatan dilakukan dengan dilampiri bukti transaksi nasabah.
H Tahap dokumentasi kredit			
1.	Administrasi kredit mendokumentasikan perjanjian kredit, dokumen yang berkaitan dengan realisasi kredit, dokumen yang terkait dalam realisasi dan supervisi kredit dan pelaporan kredit.	✓	Dilampiri bukti transaksi dan disatukan kedalam satu map untuk satu nama nasabah.
2.	Map-map kredit disimpan secara aman dan sistematis sehingga mudah untuk diambil dan dikembalikan.	✓	Dokumentasi kredit akan diletakkan pada rak arsip kredit.
3.	Bila ada perubahan-perubahan data nasabah, apakah sudah disampaikan kepada administrasi kredit.	✓	Pemberitahuan dimaksudkan untuk validasi data nasabah.
I Supervisi dan pelaporan			
1.	Supervisi dilaksanakan langsung kelapangan atau ke tempat/lokasi objek pembiayaan.	✓	Supervisi yang dilakukan kepada pihak nasabah dimaksudkan untuk laporan rutin kepada pihak Bank.
2.	Minimal supervisi dilaksanakan pada awal setelah kredit direalisasi, pada setiap terjadinya transaksi penggunaan dana kredit selanjutnya, dan supervisi rutin sesuai kebutuhan.	✓	Dimaksudkan untuk menjalin hubungan baik dengan nasabah, dan membantu apabila nasabah mengalami masalah.
3.	Melakukan evaluasi laporan rutin perkembangan usaha yang dibuat debitur.	✓	Divisi pelaporan akan melakukan evaluasi untuk laporan rutin kepada pihak Bank.
4.	Membuat laporan kunjungan diawalmusaha atau awal realisasi kredit dan laporan kunjungan rutin.	✓	Hasil laporan kunjungan akan dijadikan sebagai laporan rutin kepada pihak Bank.

5.	Laporan pengawasan disimpan dalam arsip kredit debitur.	✓	Berkas laporan akan diletakkan pada rak arsip kredit.
----	---	---	---

Sumber : diolah oleh peneliti (2021)

Dari analisis diatas diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pemberian kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang sudah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan dibuat oleh pimpinan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan atas pembahasan serta hasil penelitian yang sudah dilaksanakan yang berisikan Analisis Prosedur Pemberian Kredit Terhadap Hasil Audit Operasional (Studi Kasus Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang), maka terdapat kesimpulan yang didapat dan disimpulkan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung mengenai keadaan perusahaan dan prosedur pemberian kredit, khususnya kepada pimpinan dan karyawan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pangkalpinang yang dilakukan secara formal.

1. Kegiatan perkreditan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang sudah baik, karena pelaksanaannya tetap terjaga sesuai dengan ketentuan pemberian kredit yang telah dibuatnya.
2. Audit operasional atas kegiatan perkreditan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 dimana audit operasional telah dilakukan dengan proses yang sistematis yang mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).
3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang sudah sangat sering dilakukan agar supaya masyarakat mudah mendapatkan informasi yang diterapkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang.

Saran

1. Audit operasional yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang ini sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999. Namun peneliti mempunyai saran akan lebih baik kalau audit dilakukan lebih spesifik pada satu jenis kredit misal

kredit modal kerja atau kredit rumah saja, tidak secara langsung membahas kredit secara umum agar nantinya lebih mudah dalam melakukan evaluasi kerja.

2. Sistem pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang sudah cukup baik, dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Akan tetapi lebih baik apabila adanya pemisahan tugas antara pelaksana kredit dan pembahas kredit, pemisahan tugas antara pelaksana kredit dan analisis kredit, dan pemantauan dalam proses pemberian kredit harus dilakukan secara rutin.

DAFTAR PUSTAKA

- 1] American Institut of Banking (1995). *“Dasar – Dasar Operasi Bank”*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- 2] Jusup, Al Haryono. Drs. M.B.A. Akuntansi (2001). *“Dasar – Dasar Akuntansi”*. Yogyakarta : BPF.
- 3] Kamir, (2004). *“Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- 4] Mulyono, teguh Pudjono (2007). *“Manajemen Perkereditan Bagi Perbankan”*. Komersil Yogyakarta.
- 5] Novitasari, Putri Ariska (2016). *“Analisis audit Operasional Terhadap Prosedur Pemberian Kredit”*. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma.
- 6] Suyatno, Thomas (2001). *“Dasar – dasar perkreditan”*. Jakarta. Cetakan Kesebelas Gramedia Pustaka Utama.
- 7] Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992. *“Tentang Perbankan”*
- 8] Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998. *“Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992. “Tentang perbankan”*.
- 8] Wulandari, Nurul (2011). *Pengaruh Audit Operasional terhadap penningkatan Efektivitas Produksi pada PT. Nirmala Abdi Damai Pekanbaru. Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Sultan Sayarif Kasim Riau.*
- 9] <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-bank-menurut-para-ahli/>. Diunduh pada tanggal. 27 Februari 2019. Pukul. 21.22 WIB.
- 10] <https://www.gurupendidikan.co.id/7-pengertian-audit-menurut-para-ahli-beserta-jenisnya/>. Diunduh pada tanggal. 27 Februari 2019. Pukul. 21.42 WIB.
- 11] <http://www.artikelsiana.com/2015/09/pengertian-operasional-menurut-para-ahli.html>. Diunduh pada tanggal. 27 Februari 2019. Pukul. 21.46 WIB.
- 12] <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-akuntansi-menurut-para-ahli/>. Diunduh pada tanggal. 27 Februari 2019. Pukul. 01.42 WIB.

- 13] <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/02/9-pengertian-kredit-menurut-para-ahli-terlengkap.html>. Diunduh pada tanggal. 28 Februari 2019. Pukul. 12.42 WIB.
- 14] Ismail. 2010. "*Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*". PrenadaMedia Group. Jakarta
- 15] Kasmir. 2003. "*Manajemen Perbankan*". Edisi Ke-4, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- 16] Kasmir. 2010. "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*". Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- 17] Muljono Teguh Pudjo. 2002. "*Aplikasi Management Audit Dalam Industri Perbankan*". Edisi ke-1, BPFE. Yogyakarta.
- 18] Mulyadi. 2010. "*Auditing*". Jilid I, Cetakan ke Tujuh, Salemba Empat. Jakarta.
- 19] Peraturan Bank Indonesia Nomor: 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. .
- 20] Sukrisno. 2004. "*Pemeriksaan Akuntan Oleh AKP*". Buku 1, Jilid 1, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- 21] Suyatno. 2003. "*Dasar-Dasar Perkreditan*". PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- 22] Tunggal. 2001. "*Audit Operasional (Suatu Pengantar)*". Harvindo. Jakarta.
- 23] Undang-Undang No 10 Tahun 1998. *Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.*